

BAB II

ISU-ISU SENTRAL POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PASCA PD II

Pasca PD II Amerika Serikat muncul sebagai negara adidaya dengan paham liberalismenya, dimana pada PD II ini Amerika Serikat mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempengaruhi negara-negara yang ada di dunia.

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai kebijakan politik luar negeri yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terkait dengan isu-isu internasional mengenai persaingan ideologi, kerjasama ekonomi, dan isu terorisme.

A. Persaingan Ideologi

Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang menganut paham demokrasi liberal, dimana pembentukan ideologi terbentuk dari nilai budaya para pendatang terdahulu yang memasuki benua Amerika Serikat. Nilai budaya tersebut tercakup dalam konsep-konsep: *The American Dream*, *Mayflower Compact*, *Manifest Destiny*, *City Upon A Hill* (Minderop, 2006). Perpaduan antara liberalisme dengan nilai budaya inilah yang menjadi bentuk ideologi negara Amerika Serikat hingga saat ini.

Pasca Perang Dunia II memunculkan dua negara adidaya yang saling beradu ideologi, dimana kedua negara mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyebarkan pengaruhnya. Pada saat itu Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Harry S. Truman (1945-1950) yang disibukkan dengan kebijakan untuk merehabilitasi Eropa yang luluh lantak akibat Perang Dunia II, diantaranya *Truman Doctrine*, *Marshall Plan* dan NATO (Ferida, 2012). Kebijakan ini merupakan cara Amerika Serikat untuk memperkuat Eropa Barat dengan memberikan bantuan dari segi sosial maupun politik, kebijakan ini pun bertujuan untuk membendung paham komunisme dari Uni Soviet yang mulai

mempengaruhi Eropa khususnya Eropa Barat dan yang mulai merambah ke kawasan Asia (Anfabl, 2016).

Kebijakan untuk membendung mencegah paham dari pihak lawan ini dikenal dengan *containment policy*. Tujuan dari *containment policy* adalah untuk mencegah berkembangnya pengaruh suatu negara atau suatu sistem politik dari pihak lawan, dimana lawan Amerika Serikat adalah komunis. Maka strategi *containment policy* dikenal pula sebagai *containment of communism* (Negara, 2014).

Deklarasi Truman Doctrine merupakan tonggak berdirinya *containment of communism*, ia berkata “saat-saat menentukan telah tiba,” dan warga dunia “harus memilih dua jalan hidup” (Huntington, 2005). Ini merupakan langkah awal untuk membendung pengaruh komunisme terhadap Eropa Barat dengan cara memberikan bantuan dari segi ekonomi dan militer terhadap negara-negara di Eropa Barat yang luluh lantak akibat PD II. Amerika Serikat membentuk aliansi dengan negara-negara di Eropa Barat untuk membendung paham komunisme dari Uni Soviet dan membentuk pertahanan militer (Rizkaperdana-fisip11, 2012). Dengan adanya bantuan ini membuat adanya keterikatan negara-negara di Eropa Barat dengan Amerika Serikat, hal ini pun membuat adanya blok pemisah antara liberal dan komunisme. Blok Liberal yakni Amerika Serikat dan Eropa Barat atau biasa dikenal dengan Blok Barat, sedangkan Blok Komunis yakni Uni Soviet dan Eropa Timur atau biasa dikenal dengan Blok Timur.

Kebijakan Truman dalam membantu rekonstruksi negara-negara di Eropa Barat akibat Perang Dunia II diwujudkan dengan *Marshall Plan*. *Marshall Plan* merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dengan “tujuan resmi” membiayai pemulihan ekonomi Eropa tahun 1948 dan 1951 yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat George Marshall (Hour, 2012). Amerika Serikat berkonsentrasi untuk membentuk Eropa Barat bersatu,

dengan “pemanfaatan rasional potensi ekonomi Eropa” dan “alternatif bagi orang Eropa melawan propaganda komunis”.

Amerika Serikat menyalurkan dana lebih dari USD 13 miliar (Staff, 2009), dimana bantuan ini dikelola oleh *Economic Cooperation Administration* (ECA) sekaligus sebagai penyalur dana bantuan dari Washington DC. Keberhasilan dari Marshall Plan ini mampu mengucurkan dana kepada CIA sebesar US\$ 685 juta, tujuannya untuk mendanai operasi intelijen terselubung di seantero Eropa (Hasan, 2018). Kebijakan ini berhasil memicu pemulihan ekonomi Eropa Barat, reorganisasi ekonomi ini meliputi integrasi ekonomi dan federalisme yang memberikan ketertarikan bagi investor asing Amerika Serikat.

Amerika Serikat pun bersama dengan negara-negara di Eropa Barat diantaranya, Inggris, Perancis, Italia, Belgia, Belanda, Luxemburg, Kanada, Portugal, Polandia, Denmark, dan Islandia) (Fahrurodji, 2005), untuk membentuk pakta pertahanan. Pakta pertahanan ini bertujuan untuk membendung akan adanya pengaruh komunisme masuk ke Eropa Barat. Adanya kekhawatiran ini, maka Amerika Serikat membentuk organisasi internasional dalam bidang keamanan yakni NATO (North Atlantic Treaty Organization) atau biasa disebut dengan Pakta Pertahanan Atlantik pada 1949 (Zakky, 2017). NATO pun memperkuat persenjataan dan basic militer untuk menunjang terbentuknya kekuatan yang kokoh di Blok Barat.

Selain dengan negara-negara Eropa Barat, NATO juga mengajak Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru sebagai partner countries nya untuk menandatangani dan ikut serta dalam menghadapi tantangan dalam mewujudkan keamanan dunia internasional (Habibie, 2013). Dengan adanya *partner countries* ini diharapkan Amerika Serikat untuk memudahkan NATO mencapai tujuannya mewujudkan dunia internasional yang damai, adapun fungsi dari NATO untuk mencapai tujuannya:

1) Menyelesaikan Sengketa Secara Damai.

Berkaca pada peristiwa PD I dan PD II, dimana setiap adanya konflik antar negara di selesaikan dengan cara peperangan dan menimbulkan korban jiwa. Dengan adanya NATO ini sebagai mediasi antar negara yang berkonflik, menyelesaikan dengan cara berunding, dan menghasilkan perjanjian antar kedua negara yang berselisih.

2) Saling Membantu dan Membela Negara Sesama Anggota NATO.

Berdirinya NATO dengan tujuan mewujudkan keamanan dunia internasional terutama bagi negara-negara yang masuk dalam keanggotaan NATO. NATO semakin kuat akibat runtuhnya Uni Soviet dan Pakta Warsawa, banyak negara-negara yang ada di dunia untuk ikut bergabung dalam NATO.

3) Menghindarkan Penggunaan Kekerasan dan Ancaman Militer.

Disini NATO berfungsi sebagai penjamin keamanan antar negara yang melakukan hubungan diplomatik, apabila terjadi konflik di selesaikan dengan mengedepankan cara berunding ketimbang kekerasan dan peperangan.

4) Menghapuskan Sengketa Politik Ekonomi Internasional.

Ketika negara satu dengan negara lainnya melakukan hubungan diplomatik, tidak terlepas dari kerjasama di bidang ekonomi dan politik. Disini NATO sebagai landasan untuk

menghapuskan sengketa politik ekonomi internasional untuk tetap menjaga keharmonisan dunia internasional (Sari, 2015).

Persaingan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet pun mulai merambah ke Kawasan Asia Pasifik, kemudian upaya yang dilakukan oleh Truman yakni membuat pakta pertahanan di Asia Pasifik untuk membendung paham komunisme dan jatuhnya negara-negara Asia dalam koloni Uni Soviet. Maka dari itu, Amerika Serikat membentuk pakta ANZUS yang merupakan bentuk kerjasama pertahanan “aliansi pertahanan” antara Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat yang dibentuk dan ditandatangani pada September 1951 di San Fransisco (Wulandari, 2012). Pakta ANZUS ini terbentuk akibat kekhawatiran Australia dan New Zealand akan adanya ekspansi dari Jepang di masa mendentang, dan kebangkitan komunis di Asia Pasifik (State, 2009). Pakta ini masih berhubungan dengan Pakta NATO, sebab Australia dan New Zealand merupakan koloni Inggris dan masuk dalam partner countries dari NATO. Dimana tujuan dari NATO untuk mewujudkan keamanan dunia internasional, dan ANZUS untuk mengantisipasi kebangkitan komunis di wilayah Asia Pasifik.

Perang dingin merupakan era dimana adanya persaingan Amerika Serikat dengan sekutunya blok Barat dan Uni Soviet dengan sekutunya Uni Soviet. Persaingan antara blok Barat dan blok Timur ini diawali dengan adanya konflik ideologi komunis dan kapitalis yang kemudian merambah pada persaingan komersil dan militer. Persaingan antara kedua negara ini tidak secara langsung menghasilkan konflik militer secara langsung, namun aksi militer atau perang atasnama atau perang proksi (*proxy war*) ini melibatkan negara-negara yang ada di dunia bahkan negara-negara yang ada di kawasan Asia (Komisi Penerimaan, 2010).

Selain itu, pergantian presiden di Amerika Serikat juga mempengaruhi lingkup kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan oleh Amerika Serikat berdasar pada kondisi saat itu. Terpilihnya Dwight D. Eisenhower juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, hal ini disebabkan oleh lingkungan internasional dan latar belakang identitas Eisenhower yang moderat (Ferida, Dwight D. Eisenhower, 2012). Pada awal pemerintahannya, Eisenhower semakin memperkuat basis pertahanan baik dalam maupun luar negeri. Eisenhower juga semakin mempertegas eksistensi Badan Intelejen Amerika Serikat (CIA) dan NATO.

Pada awal pemerintahannya, Eisenhower dihadapkan dengan adanya Revolusi Kuba dan nasionalisasi properti Amerika Serikat yang ada di Kuba. Dalam kepemimpinan Eisenhower yang masih terfokus dengan pembendungan komunisme ini juga tidak terlepas dari Kuba. Terpilihnya Eisenhower bersamaan dengan adanya penggulingan rezim Batista oleh revolusioner bernama Fidel Castro, yang mana setelah Fidel menduduki kursi presiden di Kuba banyak kebijakannya yang menimbulkan respon negatif dari Amerika Serikat (Pontoh, 2009).

Eisenhower juga memperluas pertahanan untuk membendung paham komunis Uni Soviet ke Asia Tenggara khususnya di Vietnam, maka ia membentuk *South East Asia Treaty Organization* (SEATO) (Setyawan, 2015). SEATO merupakan pakta pertahanan yang didirikan dan ditandatangani oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Australia, Selandia Baru, Filipina, Thailand, dan Pakistan di Manila pada tanggal 8 September 1954 (Britannica, 2016). Pembendungan komunisme ini sangat terlihat, sebab hanya ada dua negara Asia Tenggara yang mendirikan dan menandatangani pakta pertahanan ini yakni Filipina dan Thailand. Dengan adanya kepentingan Australia dan Selandia Baru terhadap urusan Asia karena letak geografisnya di Asia Pasifik, Inggris dan Perancis yang mempertahankan koloninya di wilayah Indocina, serta dukungan yang diharapkan Pakistan

untuk melawan India, dimana kepentingan-kepentingan tersebut yang membuat Amerika Serikat memutuskan Asia Tenggara sebagai perbatasan untuk membendung paham komunisme (Southeast Asia Treaty Organization (SEATO), 1954).

Pada tahun 1958 muncul Eisenhower Doctrine yang muncul akibat adanya perselisihan sipil yang ada di Lebanon, hal ini menyebabkan Presiden Lebanon yakni Camille Chamoun meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Sebelumnya pada 5 Januari 1957 dalam pidatonya yang berjudul "*Special Message to the Congress on the Situation in the Middle East*" sebagai bentuk tanggapan Eisenhower atas situasi yang semakin tegang di Timur Tengah. Untuk itu Eisenhower mengusulkan kebijakan yang lebih proaktif di Timur Tengah, maka Amerika Serikat mengirimkan sekitar 15.000 pasukan untuk membantu mengatasi perselisihan pada saat itu (Sejarah, 2017). Sebab dengan adanya bantuan dari Amerika Serikat selain untuk menumbuhkan kepercayaan Timur Tengah terhadap Amerika Serikat, bantuan ini pun dijadikan Amerika Serikat sebagai pemenuhan kebutuhan jangka panjang, sebab Timur Tengah merupakan penghasil minyak terbesar di dunia. Eisenhower Doctrine bertujuan untuk melindungi bangsa-bangsa timur terhadap pengaruh komunisme (Shadily, 1973).

B. Kerjasama Ekonomi

Kebijakan Amerika Serikat terkait kerjasama ekonomi yakni membentuk perjanjian GATT atau *General Agreement on Tariffs and Trade* (Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan) yang berfungsi untuk mengatur perdagangan dunia sebagai sarana percepatan pemulihan ekonomi pasca Perang Dunia II (*General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)). GATT didirikan pada 1 Januari 1948 di Jenewa dan ditandatangani oleh 23 negara, adapun prinsip dari terbentuknya GATT diantaranya:

1. Prinsip *resiprositas*, yaitu perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya harus juga diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut.
2. Prinsip *most favored nation*, yaitu negara anggota GATT tidak boleh memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanya pada satu atau sekelompok negara tertentu.
3. Prinsip *transparansi*, yaitu perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu negara harus transparan agar diketahui oleh negara lain (Setyawan, GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT), 2016).

GATT inipun mendukung negosiasi perdagangan pada tahun 1947, dan setelah didirikannya GATT, perundingan multilateralpun dilakukan pada di 1949 (Annecy), 1951 (Torquay), 1956 (Jenewa), 1960-1 (Putaran Dillon), dan pada tahun 1963 - 7 (Putaran Kennedy) (DP, 2012). Kemudian seiring dengan perkembangannya, pada 5 April 1994 anggota-anggota GATT menghendaki adanya perdagangan bebas dimana bertepatan dengan adanya perundingan GATT di Marakesh, Maroko. Akhirnya pada 1 Januari 1995 dalam perundingan putaran Uruguay tahun 1986-1994 muncullah gagasan WTO (*World Trade Organization*), WTO ini merupakan sebuah organisasi sebagai penyempurnaan dari GATT (Harini, 2015). Keterlibatan Amerika Serikat dalam pembentukan WTO ini sebagai penentu dalam pembatasan pada kebijakan nasional atau disintegasi rezim perdagangan dan menghendaki adanya mutual *self-restraint* sebagai isyarat adanya norma sosio-ekonomi untuk memperbaiki peran dari negara (Mastur, 2015).

Pembentukan WTO ini juga menjadi bentuk perbaikan akan adanya kekurangan dari GATT yang hanya sebuah perjanjian, sedangkan WTO merupakan organisasi yang lebih

mengikat para anggotanya. Prinsip pembentukan dan dasar pembentukan WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas *"Most-Favored-Nation principle"* (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya (World Trade Organization (WTO)). Dengan adanya WTO ini membuat keterbukaan pasar bebas ini diharapkan mampu mendorong adanya pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, membangun perdamaian dan stabilitas antar anggota WTO.

C. Isu Terorisme

Isu terorisme awalnya muncul di Amerika Serikat sendiri, bermula pada peristiwa yang dikenal dengan Serangan Teroris 9/11. Serangan teroris ini tertuju pada gedung WTC pada 11 September 2001, dimana empat pesawat jet komersil Amerika Serikat dibajak oleh 19 orang. Dua dari pesawat itu sengaja diterbangkan ke menara kembar *World Trade Center* di New York, dengan ketiga menabrak Pentagon di Virginia. Dan pesawat keempat tidak mencapai tujuan, sebab awak dan penumpang mampu mengambil alih pesawat tersebut (The 9/11 Terrorist Attacks).

Amerika Serikat menduga penyerangan teroris ini didanai oleh Osama bin Laden yang tergabung dalam organisasi teroris Al Qaeda, peristiwa ini merupakan balasan dari dukungan yang di berikan Amerika Serikat terhadap Israel dalam Perang Teluk Persia. Tercatat 2.996 orang tewas dalam serangan 9/11, termasuk 19 pembajak empat pesawat Amerika Serikat. George W. Bush pun menyatakan,

"serangan teroris dapat mengguncang fondasi bangunan terbesar kami, tetapi mereka tidak dapat menyentuh fondasi Amerika. Tindakan ini menghancurkan baja, tetapi mereka tidak bisa merusak baja dari tekad Amerika" (Staff, 9/11 Attacks, 2010).

Seminggu setelah peristiwa 9/11, Bush mengesahkan dan menandatangani *Operation Enduring Freedom* yang merupakan operasi berbasis militer, bertujuan untuk mencari keberadaan Osama bin Laden yang bersembunyi di Afghanistan dibawah kekuasaan Rezim Taliban yang dipimpin oleh Mullah Mohammad Omar (Carruthers). Amerika Serikat pun melakukan berbagai upaya untuk mencari keberadaan Osama bin Laden, awalnya Amerika Serikat kembali bersekutu dengan kelompok Burhanuddin Rabbani dan Syah Masod yang mulai terpengaruh oleh Iran dan Uni Soviet. Ini bertujuan untuk membendung pengaruh Iran dan Uni Soviet sekaligus memudahkan Amerika Serikat dalam merebut kekuasaan dan menggulingkan Rezim Taliban di bawah kepemimpinan Mullah Mohammad Omar (Rahmat, 2003). Amerika Serikat mengumumkan isu terorisme dengan “*war against terrorism*” yang untuk memerangi organisasi maupun rezim Islam yang anti Barat, hal ini menimbulkan pengaruh besar mengenai pandangan masyarakat internasional terhadap Islam.

Selain itu, Amerika Serikat meningkatkan pertahanannya di Timur Tengah dengan mengirimkan pasukan tentara NATO dan resmi menginvasi Afghanistan. Invasi ini mengakibatkan tidak adanya kenyamanan di Kabul, sedikitnya kontrol dari pemerintah, maraknya korupsi setelah terpilihnya Hamid Karzai sebagai presiden Afghanistan (Irawan, 2014). Amerika Serikat pun melakukan invasi terhadap Irak pada tahun 2003, sebab adanya rezim otoriter Saddam Husein yang mendukung adanya terorisme global. Amerika Serikat dibantu oleh seorang pembangkang Irak yakni Achmad Cholobi untuk mendapatkan informasi yang akurat di Irak dan sejarawan Yahudi yang memicu Islamofobia di Eropa. Dengan dalih memerangi terorisme Amerika Serikat memanfaatkan pers untuk membenarkan isu terorisme di Irak, selain itu dibalik penyebaran isu ini memudahkan Amerika Serikat dalam mengontrol minyak dunia yang berpusat di Irak (Setiawan, 2013).

Isu terorisme dibawah kebijakan Bush masih berlangsung hingga terpilihnya Obama sebagai presiden Amerika Serikat pada tahun 2009. Obama memanfaatkan isu ini untuk memenangkan pemilu yang berlangsung di Amerika Serikat, Obama mampu merubah pandangan khususnya warga Amerika Serikat dan masyarakat international pada umumnya mengenai Islam dan terorisme. Obama menyebutkan dalam pidatonya di Kairo bahwa Amerika Serikat tidak lagi memerangi Islam, tetapi ekstrimisme dan terorisme. Sebab Obama meluruskan keberadaan terorisme itu merupakan gerakan radikal yang tanpa menggunakan label agama (Astuti, 2016).

Obama juga mengatakan dirinya memiliki strategi menyeluruh. *“Saya memiliki punya strategi komprehensif untuk melawan terorisme termasuk operasi militer, dinas rahasia, sanksi ekonomi dan diplomasi,”* ungapnya (Konsep Anti Teror Menurut Obama, 2008) Obama memberikan bantuan ekonomi terhadap Afghanistan untuk pembangunan kembali akibat kebijakan Bush, dan memberikan bantuan terhadap Palestina. Obama akan melakukan tindakan militer jika Amerika Serikat terancam, hal ini menjadi seruan terhadap Palestina yang diduga sebagai tempat persembunyian Osama bin Laden. Amerika Serikat akan menyerang persembunyian Osama bin Laden jika Palestina tidak melakukan kerjasama, dan Amerika Serikat akan memberikan bantuan ekonomi kepada Palestina jika mau melakukan kerjasama dan ikut memerangi Al Qaeda dibawah pimpinan Osama bin Laden.

Pada 2 Mei 2011, akhirnya pasukan khusus Amerika Serikat *NAVY SEALS* berhasil melacak dan melumpuhkan Osama bin Laden di Abbotabad, utara Islamabad, Pakistan. Sebelumnya informasi keberadaan Osama diketahui atas kecurigaan agen CIA dan intelejen Amerika Serikat terhadap Al-Kuwaiti yang merupakan kurir dari Osama bin Laden (Kronologi Terbaru Penyerbuan Rumah Osama, 2011). Setelah penyelidikan selama bertahun-tahun ini membuat

pasukan Amerika Serikat mengepung tempat persembunyian Osama bin Laden, sempat terjadi baku tembak hingga Osama dan istrinya tertembak dan mati.

Masa pemeritahan Obama isu terorisme terus di gencarkan dengan tujuan mewujudkan keamanan internasional global, dalam pidatonya pada 6 Juni 2013 mengatakan bahwa keamanan bangsa "*Amerika berada di persimpangan jalan,*" maka Obama mengusulkan strategi kontraterorisme yang lebih keras (Presiden Barack Obama Menderita Paranoid Terhadap Terorisme Global, 2013). Amerika Serikat juga melakukan perundingan dengan Afghanistan mengenai penarikan tentara NATO di Afghanistan dan menyerahkan kewan Aman Afghanistan sepenuhnya pada Afghanistan itu sendiri untuk melawan Taliban, tetapi Afghanistan Adrienne Woltersdorf sebagai pimpinan kantor *Friedrich Ebert Stiftung* (FES) di Afghanistan mengatakan "*di kawasan utara situasinya agak tenang, tapi kawasan selatan, dan masih banyak kawasan lain, masih dikuasai Taliban*" (Hasrat-Nazimi, 2013).

Pada 2015 Obama kembali meyakinkan dan menenangkan warga negaranya akibat adanya pembantian di San Bernardino yang terinspirasi oleh gerakan militan ISIS (Salinas, 2015). Obama menerangkan strateginya untuk menekan ISIS di Suriah dan Irak berkoalisi untuk memerangi ekstrimis, membiayai pelatihan militer untuk memerangi ISIS, dalam negeri Obama akan memperketat visa. Obama juga mendesak Kongres untuk melawan terorisme dengan militer apabila menjadi ancaman bagi Amerika Serikat, dan akan selalu meninjau strateginya dalam memerangi terorisme.

Masa pemerintahannya Obama terus melakukan tindakan persuasif *soft diplomacy*, dengan melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain ini memudahkan Amerika Serikat untuk memerangi terorisme global. Sebab dengan cara *soft diplomacy* Obama mampu merubah pandangan warga Amerika Serikat dan masyarakat internasional bahwa

"jika kita ingin berhasil menundukkan terorisme, kita harus memasukkan masyarakat Muslim sebagai salah satu sekutu terkuat, bukan malah memojokkannya lewat rasa curiga dan benci," ujar Obama (Wahono, 2015).

Perubahan kebijakan presiden Amerika Serikat ini membuat pengaruh yang besar terhadap negara-negara di dunia, sebab perubahan kebijakan Amerika Serikat mengalami dinamika terkait isu-isu sentral pasca PD II hingga saat ini. Isu-isu sentral meliputi persaingan ideologi, regional ekonomi, maupun terorisme ini menjadikan Amerika Serikat terlibat dengan negara seperti kawasan Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Amerika Latin. Kebijakan Amerika Serikat terhadap negara di kawasan Amerika Latin contohnya seperti Kuba ini menarik untuk diamati, sebab Kuba adalah sebuah negara komunis yang bertentangan dengan Amerika Serikat, rezim Kuba yang tidak kooperatif Amerika Serikat, diberlakukannya embargo ekonomi akibat rezim yang kurang kooperatif, dan Amerika Serikat pernah memandang Kuba sebagai terorisme yang harus di perangi. Ketertarikan penulis juga disebabkan oleh putusnya hubungan Amerika Serikat dengan Kuba selama puluhan tahun akibat rezim yang tidak kooperatif dengan Amerika Serikat, hingga adanya normalisasi hubungan antar kedua negara pada 2014. Terkait dengan hal ini, maka penulis akan memaparkan sejarah hubungan Amerika Serikat dengan Kuba dan bab selanjutnya.